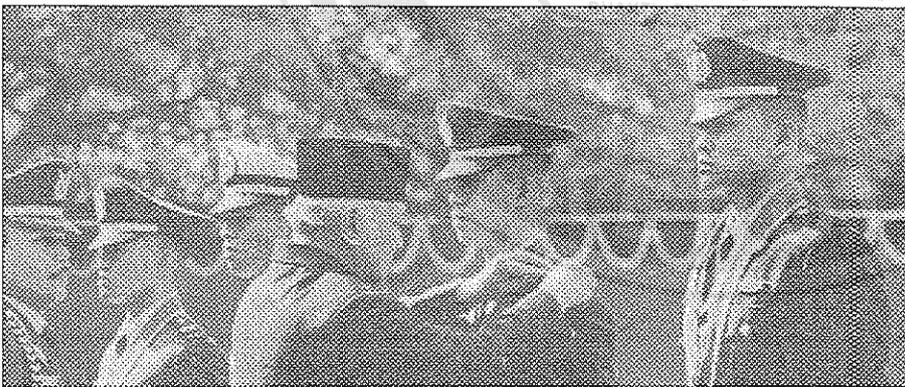


Orba, Yang Mendisain Polri Menjadi Tentara

Oleh : KADISPEN POLDA JATENG Anton Tabah

"Jika Polri menjadi tak berdaya saat ini bukan karena Polri menjadi ABRI, tetapi akibat dosa Orde Baru yang mendisain Polri jadi tentara. Polri menjadi ABRI sejak 1961, tapi jatidiri Polri saat itu tetap jelas, mandiri dan tangguh. Sejak rezim Orde Baru jatidiri Polri hilang dan lemah dalam segala lini ketika integrasi (sejak 1966) memaksa Polri harus sama dengan TNI

namun terkecil dalam anggaran. Untuk mengembalikan jatidiri Polri, era Reformasi Polri harus memiliki Departemen tersendiri agar garis hirarkinya langsung Kepala Negara sehingga tak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan lain." (Jenderal Purn. Rudini, Semarang, 22 Oktober 1998).



"Polri dianaktirikan dalam ABRI, membuat Polri lemah. Satu-satunya cara memberdayakan, Polri harus otonom dan sama kedudukannya dengan kejaksaan dan kehakiman agar harmoni dalam penegakan hukum karena tak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah." (Prof. DR. J.E. Sahetapy, Yogyakarta, 3 Februari 1993).

Mengawali tulisan ini sengaja saya kutip pendapat dua orang penting yang berbeda latar belakang namun berpandangan sama terhadap Polri yang kita jadikan setting kajian saat ini.

Sebuah paradigma pernah diajukan pakar tata negara Inggris Charles Reith, polisi harus selangkah di depan rakyatnya. Bukan hanya dalam kapasitasnya selaku pelayan hukum (The law enforcement officer), tapi juga dalam mengatasi problema sosial karena permasalahan sosial tak pernah berakar tunggal. Berbagai krisis yang terjadi adalah contoh dekat. Kalau diruntut dari awal ditemukan mata rantai talitemali. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, krisis kebangsaan, hulunya selain KKN juga pengabaian sistem, nilai, moral (secara makro) dan kejahatan (skala mikro), semuanya tak berakar tunggal.

Agar Polri dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya secara profesional, efektif, efisien dan modern, Polri harus benar-benar didisain menjadi polisi. Membangun sebuah kepolisian disuatu negara jauh lebih sulit daripada



Untuk mengembalikan jatidiri Polri, era Reformasi Polri harus memiliki Departemen tersendiri

agar garis hirarkinya langsung Kepala Negara sehingga tak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan lain.

peralatan, anggaran, kesejahteraan, pendidikan dan SDM) telah ditentukan PBB. Inilah yang dimaksud mendisain polisi untuk polisi. Misalnya, standar ratio polisi 1 : 400/penduduk, standar gaji polisi harus lebih tinggi dari gaji pegawai keuangan negara, standar pendidikan minimal setingkat lebih tinggi dari rata-rata masyarakat.

Ratio polisi menurut PBB 1 : 400 juga salah satu pembeda esensial doktrin tentara "small effectif" (kecil tapi efektif) karena kinerja tentara dapat diganti teknologi, (konsep perang modern). Tetapi kinerja kepolisian tak dapat diganti dengan teknologi karena pekerjaan polisi langsung dengan rakyat. Teknologi kepolisian

membimbing 4000 sampai 7000 penduduk. Basic pendidikan kadet polisi yang rendah. Belum masalah gaji yang hanya 25% dari gaji pegawai

keuangan negara. Mission im possible. Lihat perbandingan kesejahteraan di tabel dibawah ini :

Perbandingan Gaji Pegawai Keuangan Negara dan Polisi (Nol Tahun)
Di Beberapa Negara Dalam US Dollar

No.	Negara	Peg. Keu. Negara	Polisi	Keterangan
1.	Hongkong	724	1.323	182%
2.	Jepang	1.670	1.890	112%
3.	Singapura	510	515	101%
4.	Thailand	253	147	48%
5.	Malaysia	567	256	45%
6.	Indonesia	233	63	25%

Sumber Data, Asiaweek, Desember 1995

Jika dicermati data diatas, 3 negara urutan atas kini telah menjadi "Macan Asia", bangsa yang berdisiplin tinggi tak terlepas dari konstibusi kepolisiannya yang tangguh. Gaji polisi 3 negara tersebut ternyata jauh di atas gaji pegawai keuangan negaranya. Tapi coba lihat Indonesia, sangat tragis, gaji Polri hanya 25%

gaji pegawai keuangan negara. Ini adalah data paling konkrit jika tingkat kesejahteraan Polri yang termdah di Asia bahkan di dunia.

Demikian pula ratio jumlah personel Polri saat ini, terkecil di Asia/dunia. Kita lihat Malaysia 1 : 400. Singapura 1 : 250. Brunai 1 : 200. Philipina 1 : 500, Thailand 1 : 550. Kamboja 1 : 700. Vietnam 1 : 650, India 1 : 700. China 1 : 750 dan lain-lain. Indonesia 1 : 1500 (Nasional) Regional Jateng 1 : 2100. Demak 1 : 3000. Sayung 1 : 5000 dan seterusnya.

Berbagai analisis ini akan makin jelas dengan 5 standar baru dari PPP tentang

Kinerja kepolisian tak dapat diganti dengan



berkait dengan kesejahteraan (gaji). Mengapa dari sekian profesi, hanya kepolisian yang diatur standar persyaratan cukup ketat? Ini disebabkan pekerjaan polisi sangat berat beresiko tinggi dan berhubungan langsung dengan HAM. Persyaratan ini telah dijadikan acuan universal untuk mendisain kepolisian sedunia.

KAJIAN MASALAH :

Standar PBB tersebut sangat bijak dijadikan bahan kajian terhadap Reformasi Polri saat ini. Indonesia sebagai negara berkembang dengan beragam keterbatasan tentu belum bisa memenuhi sekian persyaratan/standar PBB tersebut. Namun juga tak bijaksana jika pemerintah tak memenuhi sebagian dari standar tersebut dan kalau hal ini diabaikan akan menjebak Polri pada "mission impossible" yang sangat sulit. Disinilah pentingnya kearifan manajerial para pengambil keputusan di republik ini untuk mendisain kepolisiannya yang ideal, setidaknya mendekati ideal.

Sebagai contoh, masalah personil mungkin pemerintah masih sulit memenuhi standar rasio Polri dengan jumlah penduduk yang semestinya 1 : 400. (1 polisi mengontrol 400 penduduk). Juga peralatan kepolisian paling mendasar seperti tameng, tongkat polisi, HT, peluru karet, peluru hampa, mestinya tiap Polres minimal memiliki 500 buah tetapi kenyataannya hanya

SDM dan kesejahteraannya yang masih jauh dari standar PBB.

Tentang kesejahteraan polisi diatur oleh PBB lebih tinggi dari profesi apapun. Pekerjaan polisi memang berat, dimasa perang maupun damai. Membimbing masyarakat bangsanya berdisiplin. Ditangan polisi hukum menjadi mati atau hidup. Juga telah diperhitungkan seksama tingkat resiko polisi. Pasukan tentara punya zone-zone yang jelas, sedang pasukan polisi yang melindungi rakyat sipil tidak dibatasi zone-zone secara tegas. Polisi harus mengamankan rakyat dimanapun rakyat berada. Sebab itu dalam setiap penugasan Pasukan Perdamaian PBB, korban dari pihak polisi jauh lebih besar dari tentara dan pada umumnya terkena ranjau yang dipasang oleh pasukan yang bertikai. Karena itu dalam setiap penugasan PBB uang saku polisi 5 kali lipat lebih besar dari uang saku tentara.

Dari sekian standar PBB tersebut kekurangan personil bisa ditolerir asal tak terlalu jauh, misal 1 : 700. Tapi kalau kekurangan personil Polri seperti sekarang ini apalagi jika seluruh standar PBB tak terpenuhi, akan amat sulit bagi Polri untuk eksis sebagai penegak hukum dan pelindung rakyat. Kondisi macam inilah Polri saat ini. Sejak Orde Baru Polri belum didisain menjadi polisi, tapi lebih didisain jadi tentara, seperti doktrin, kurikulum, struktur organisasi dan sebagainya.